

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”(Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996).

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi

yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah saat ini seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang umumnya masih rendah mempengaruhi kemampuan dalam mengelola Sumber Daya Air.

Dalam praktek di lapangan kelembagaan petani dalam wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) masih belum optimal tingkat kinerjanya, baik di bidang organisasi, keuangan maupun pemanfaat air irigasi, pemeliharaan air irigasi, pemeliharaan fisik serta pembinaan. Pemerintah pusat dengan bantuan dari Bank Dunia melalui Program *Participatory Irrigation Sector Project (PISP)* berupaya untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan air irigasi utamanya ditingkatkan usaha tani. Pada pelaksanaan operasional di lapangan, program ini dilaksanakan dengan sistem dana kontribusi dan pendampingan dari pemerintah pusat (APBN), propinsi (APBD Propinsi) maupun kabupaten (APBD Kabupaten). Program *Participatory Irrigation Sector Project (PISP)* merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh sub bidang infrastruktur di instansi Bappeda Purworejo.

Program *Participatory Irrigation Sector Project* adalah sebuah program yang akan mengembangkan dan mengupayakan agar masing-masing Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) baik pusat maupun daerah termasuk

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A) dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan irigasi. Program *Participatory Irrigation Sector Project* mulai direncanakan pada tahun 2005 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan akan berakhir pada bulan Juni 2011. Di wilayah Jawa Tengah program *Participatory Irrigation Sector Project* dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas. Dengan Kabupaten Banyumas sebagai koordinator dan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten potensial. Program *Participatory Irrigation Sector Project* dijalankan oleh 3 dinas yaitu, Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Ketiga dinas tersebut mempunyai tugas masing-masing, Bappeda tugasnya dalam penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Dinas Pengairan tugasnya pada teknis pengairan dan Dinas Pertanian yang tugasnya pada teknis pertanian. Dalam pelaksanaannya ketiga dinas tersebut dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Tugas dari Tenaga Pendamping Masyarakat adalah sebagai perpanjangan tangan dari dinas-dinas tersebut ke Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kedudukan Tenaga Pendamping Masyarakat berada di bawah pengawasan Bappeda khususnya di Sub Bidang Infrastruktur.

Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat, yaitu Daerah Irigasi Siwatu dan Daerah Irigasi Panungkulan. Dalam pelaksanaan kegiatan program ini terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

- Dalam pelaksanaan program *Participatory Irrigation Sector Project* sering diadakan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh pusat,

tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memantau pelaksanaan program dan juga memberikan masukan-masukan tentang hal-hal baru. Seperti memberikan *software* terbaru, namun karena jarak antara pertemuan satu dengan pertemuan lainnya berjarak dekat sehingga membuat pihak pelaksana program menjadi bingung karena *software* yang satu belum terlalu dikuasai sudah ada *software* lain.

- Pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project* yang kurang maksimal karena tiap tahunnya bergantung *Annual Work Plan* dan selalu berganti Daerah Irigasi, selain itu pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project* tiap tahunnya hingga tahap Legalisasi, tidak sampai pada tahap monitoring sehingga jika terjadi kekurangan ataupun kesulitan tidak dapat terdeteksi sedini mungkin.
- Tidak sesuainya antara jumlah Daerah Irigasi dengan jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat.
- DIPA yang terlambat membuat pelaksanaan program *Participatory Irrigation Sector Project* tersendat.
- Kualitas Pemimpin Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan tokoh masyarakat berpengaruh dalam pelaksanaan program *Participatory Irrigation Sector Project*.
- Kondisi geografis Daerah irigasi dan mata pencaharian penduduk menentukan penerimaan program *Participatory Irrigation Sector Project*.

- Di beberapa Daerah Irigasi terjadi missskomunikasi antara perangkat desa dengan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), hal ini menghambat pelaksanaan program *Participatory Irrigation Sector Project*.
- Pelaksanaan program *Participatory Irrigation Sector Project* dirasa warga hampir sama dengan gotong royong ataupun kerja bakti yang sering dilaksanakan oleh warga.
- Kepengurusan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang seperti efek kembang api, giat di awal program namun lama kelamaan pengurus menghilang.
- Waktu dalam pelaksanaan pendampingan warga yang kurang sehingga warga Daerah Irigasi tahun sebelumnya masih bertanya kembali kepada pihak Tenaga Pendamping Masyarakat tentang program *Participatory Irrigation Sector Project*.
- Program *Participatory Irrigation Sector Project* dapat meningkatkan kesadaran warga tentang pemeliharaan jaringan irigasi

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bagaimana pencapaian program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilakanakan oleh Bappeda kabupaten Purworejo khususnya di daerah irigasi Panungkulan dan Siwatu?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang ingin diangkat adalah:

1. Bagaimana pencapaian program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo khususnya di daerah irigasi Panungkulan dan Siwatu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pencapaian program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo khususnya di daerah irigasi Siwatu dan Panungkulan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian pengetahuan dalam bidang sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo khususnya di daerah irigasi Siwatu dan Panungkulan.

2. Secara Praktis

1. Diharapkan melalui peneiltian ini dapat menambah informasi bagi instansi, khususnya instansi pemerintah tentang pencapaian Program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo .

E. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan pemberdayaan masyarakat berangkat dari realitas objektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat (Margot Breton, 1994). Pemberdayaan merupakan alternatif pembangunan yang dirumuskan menurut cara pandang *developmentalisme* (Modernisasi). Pemberdayaan lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal. Pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik, dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama dalam memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Sedangkan Negara menjadi fasilitator dan membuka ruang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama - tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

2. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya penerapan pemberdayaan masyarakat, perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat

tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka. Kekuatan yang dimiliki masyarakat tersebut antara lain :

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan hidup lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekon
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi (Jim Ife, 1997 : 60-62).

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya penerapan pemberdayaan menurut Eko Sutoro antara lain:

1. Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan
3. Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.
4. Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
5. Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial.
6. Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris
7. Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin
8. Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat
9. Pembangunan secara menyeluruh
10. Menggunakan organisasi belajar non-hirarkis
11. Peran negara adalah menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi –institusi masyarakat.

Penerapan pemberdayaan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan yang dilakukan dengan proses pendidikan dan pertumbuhan

kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Jim Ife, 1997: 63-64).

3. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pada Program *Participatory Irrigation Sector Project*

Participatory Irrigation Sector Project adalah Sebuah program yang akan mengembangkan dan mengupayakan agar masing-masing Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) baik pusat maupun daerah termasuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A) dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan irigasi. Program *Participatory Irrigation Sector Project* mulai direncanakan pada tahun 2005 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan akan berakhir pada bulan Juni 2011.

Program *Participatory Irrigation Sector Project* dijalankan oleh 3 dinas yaitu, Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Ketiga dinas tersebut mempunyai tugas masing-masing, Bappeda tugasnya dalam penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Dinas Pengairan tugasnya pada teknis pengairan dan Dinas Pertanian yang tugasnya pada teknis pertanian. Dalam pelaksanaannya ketiga dinas tersebut dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Tugas dari Tenaga Pendamping Masyarakat adalah sebagai perpanjangan tangan dari dinas-dinas tersebut ke Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kedudukan Tenaga Pendamping Masyarakat berada di bawah pengawasan Bappeda khususnya di sub bidang infrastruktur.

Alasan utama Program *Participatory Irrigation Sector Project* antara lain:

- Rendahnya partisipasi masyarakat
- Rendahnya efisiensi pada pengelolaan irigasi.
- Efektivitas (Kecukupan Air Yang Mencapai Lahan Sesuai Waktu Yang Dibutuhkan) Terbatas Pada Pengelolaan Irigasi.
- Kerusakan Jaringan Irigasi Terjadi Sangat Cepat Sesudah Konstruksi Selesai.
- Kurangnya Kemampuan Institusi yang Menangani Irigasi Untuk Memelihara Kelangsungan Pengelolaan Irigasi, dan
- Pendekatan Instansi-Instansi Pemerintah Secara *Top-Down* Telah Mengurangi Kemampuan Petani Untuk Menolong Dirinya Sendiri.

4. Tujuan Program *Participatory Irrigation Sector Project*

Tujuan Program *Participatory Irrigation Sector Project* adalah :

- Mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah yang membidangi irigasi dan komisi irigasi di kabupaten atau propinsi
- Mewujudkan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A)
- Mewujudkan peningkatan fungsi, jaringan irigasi dan keberlanjutan sistem pembiayaan pengelolaan irigasi
- Mewujudkan peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani di wilayah proyek melalui akses perolehan kredit, penyediaan fasilitas dan sarana irigasi yang memadai.
- Memberikan dukungan bagi operasional dan bantuan teknis bagi pelaksana proyek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dimana dalam penelitian ini teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data (Bungin,24:2008)

2. Objek penelitian

1. Penulis mengambil objek penelitian pada pencapaian program *Participatory Irrigation Sector Project* yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo khususnya di daerah irigasi Siwatu dan Panungkulan.

Alasan pemilihan lokasi tersebut,antara lain:

- Daerah Irigasi Siwatu merupakan daerah pesisir dengan air yang terbatas dan infrastruktur irigasi yang kurang memadai sehingga jika musim hujan dilanda banjir dan musim kemarau kekeringan.
- Daerah Irigasi Panungkulan berada didaerah, dimana terdapat daerah yang berlimpah air, namun juga terdapat daerah yang airnya terbatas. Sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengakomodir air ke Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini terdiri dari beberapa staf pegawai pada sub bagian infrastruktur dimana pada sub bagian ini yang melaksanakan Program

Participatory Irrigation Sector Project. Selain itu subjek penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai subjek dari Program *Participatory Irrigation Sector Project* dan juga Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai perpanjangan tangan dari Bappeda. Alasan pemilihan subjek diatas karena subjek penelitian berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan subjek penelitian mampu memberikan data dan informasi serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari informan utama dapat berupa wawancara dan hasil pengamatan catatan di lapangan. Sumber data diperoleh dari:

1. Staf Bappeda Kabupaten Purworejo khususnya pada Sub Bagian Infrastruktur dimana sub bagian ini adalah yang melaksanakan Program *Participatory Irrigation Sector Project*. Dengan informan utamanya adalah staf sekretariat dan bendahara serta kepala sub bidang infrastruktur.
2. Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Purworejo khususnya yang berada di Daerah Irigasi Panungkulan dan Siwatu yang berjumlah 25 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan informan utamanya adalah lima orang ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Daerah Irigasi Panungkulan

dan Siwatu dengan ketentuan dua orang dari ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Panungkulan dan dua orang dari ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Siwatu serta seorang Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Selain itu juga beberapa warga yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

3. Tenaga Pendamping Masyarakat, dimana dalam pelaksanaan program ini terdapat sembilan Tenaga Pendamping Masyarakat namun yang menjadi informan ada tiga orang. Informan tersebut adalah ketua dari Tenaga Pendamping Masyarakat dan juga dua orang Tenaga Pendamping Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap Daerah Irigasi Siwatu dan Panungkulan.

Data primer yang dibutuhkan :

1. Pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project*.
2. Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project*.
3. Solusi yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan - permasalahan yang terjadi.

b. Data Sekunder

Penulis mengutip dari sumber lain dengan tujuan untuk melengkapi data primer seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan Program *Participatory Irrigation Sector Project* antara lain Literatur Laporan Penyadaran Publik PPSI Secara Partisipatif *Participatory Irrigation Sector Project* (PISP) 2007. Selain itu penulis menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan penelitian dan juga buku-buku tentang pemberdayaan masyarakat sebagai pijakan teori. Data tersebut digunakan untuk mendukung koherensi data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain yang bertujuan untuk melengkapi data primer.

G. Teknik pengumpulan data

1. Observasi:

Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti yaitu pegawai pada Sub Bagian Infrastruktur dimana pada sub bagian ini yang melaksanakan *Program Participatory Irrigation Sector Project*. Selain itu subjek penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai subjek dari Program *Participatory Irrigation Sector Project*.

Dalam penggunaan teknik observasi yang terpenting pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi dilakukan untuk melengkapi dan menambah hasil pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi (Rakhmat, 2003:85). Kegiatan yang menjadi objek observasi adalah pelaksanaan Program *Participatory Irrigation Sector Project*.

Observasi yang dilaksanakan oleh penulis antara lain dilakukan di kantor Bappeda dengan subjek penelitian adalah staf Bappeda yang terkait dengan Program *Participatory Irrigation Sector Project* dan juga Tenaga Pendamping Masyarakat. Selain itu penulis juga melakukan observasi di beberapa Daerah Irigasi antara lain di Daerah Irigasi Siwatu dan Panungkulan dengan subjek

penelitian adalah masyarakat yang tergabung Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dari kedua daerah Irigasi tersebut.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah merupakan sumber data yang sangat penting. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana sama dengan wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan wawancara lainnya adalah bahwa wawancara dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin,2008:108).

Alat yang digunakan ialah *interview guide*. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan baik yang sudah digariskan maupun yang nantinya muncul secara spontan. Wawancara yang dilakukan diharapkan untuk melengkapi apa yang tidak diperoleh dalam pengamatan penelitian (Rakhmat,2003:98). Wawancara merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi rencana, ide-ide, ataupun apa yang dipikirkan seseorang untuk menyusun strategi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yang terdiri dari:

- a. Staf pada Sub Bagian Infrastruktur Bappeda Kabupaten Purworejo dimana pada sub bagian ini yang melaksanakan Program *Participatory Irrigation Sector Project*.
- b. Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai subjek dari Program *Participatory Irrigation Sector*

Project khususnya pada Daerah Irigasi Panungkulan dan Siwatu.

- c. Tenaga Pendamping Masyarakat yang merupakan perpanjangan dari Bappeda

H. Proses Analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode non statistik yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. (Nawawi,1984:11)

Proses analisis data dimulai dengan membaca, mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia yang berasal dari berbagai sumber antara lain hasil wawancara, hasil pengamatan yang telah ditulis dalam catatan harian, dokumen resmi, gambar, foto, hasil pengamatan lapangan dan sebagainya. Setelah itu data kemudian dipilah – pilah, diklasifikasi mensintesis dan membuat ikhtiar lalu yang terakhir adalah berpikir agar data tersebut mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan – hubungan serta membuat temuan – temuan umum.